

EDISI : Rabu , 10 April 2019

KLIPING BERITA MEDIA CETAK KABUPATEN BULELENG



PENYUSUN :
SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
SETDA KABUPATEN BULELENG

Nama Media : *DenPost*

Kategori : *KEUANGAN*

Pemkab Buleleng-Kejari Kerjasama Pendampingan Tata Kelola Dana Desa



DenPost/robin

KERJASAMA - Wabup Sutjidra bersama Kajari Buleleng, Wahyudi, SH, MH saat penandatanganan naskah kerjasama.

Singaraja, DenPost

Guna tersalurnya dana desa yang baik sesuai peraturan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng menyelenggarakan sosialisasi Program Jaksda Jaga Desa dan Penandatanganan MoU Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Desa yang Transparan, Akuntabel, Disiplin dan Tertib Anggaran di Kabupaten Buleleng Tahun 2019. Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Kantor Kejari Buleleng dan diikuti seluruh kepala desa se-Kabupaten Buleleng, Selasa (9/4) kemarin.

Dalam kesempatan itu, hadir Wakil Bupati Buleleng, dr. I Nyoman Sutjidra, Sp. OG, mewakili Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, ST. Selain itu, sosialisasi itu juga dirangkaikan dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah

Kabupaten Buleleng dengan Kejaksaan Negeri Buleleng tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kesepakatan bersama tersebut meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum lain oleh Kejaksaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya terkait pengelolaan dana desa, serta permasalahan lain dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara yang dihadapi Pemkab Buleleng.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Nyoman Sutjidra mengatakan, kepala desa harus hati-hati dalam mengelola dana desa. Menurutnya, satu persen pun uang pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Ia tidak

menginginkan ada kepala desa yang tersangkut kasus karena menyalahgunakan dana desa.

"Kalau semua kepala desa menggunakan dana desa sesuai dengan aturan, semua akan aman," katanya.

Wabup Sutjidra juga menegaskan, kepala desa harus bisa membuat laporan program-program yang sudah dilaksanakan secara rinci. Ia juga mengatakan, kepala desa tidak usah ragu berkonsultasi dengan Kejari Buleleng.

"Kejari Buleleng pasti akan membukakan pintu selebar-lebarnya jika ada kepala desa yang ingin berkonsultasi. Saya menjamin jika semuanya sudah berjalan sesuai dengan aturan, pasti aman," tegasnya lagi.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng, Wahyudi, SH, MH, mengatakan, pengelolaan dana desa harus transparan dan akuntabel. Wahyudi berpesan, hindari segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan dalam pengelolaan dana desa. Ia menginginkan, dana desa betul-betul sampai ke sasaran untuk pembangunan yang ada di desa. Wahyudi juga mempersilakan bagi kepala desa yang ingin berkonsultasi tentang pengelolaan dana desa.

"Saya berharap seluruh hadirin yang ada di sini, bertemulah dengan kami dengan kapasitas sebagai pengacara negara sesuai dengan fungsi Kejaksaan, yaitu sebagai pengacara negara, yang bisa mendampingi kepala desa. Bukan sebagai penyidik, penyidik maupun sebagai penuntut umum," pungkasnya. (c/118)

Nama Media : *DenPost*

Kategori : *APBD*

Soal Dana BKK Disulap Jadi Bansos

Bupati PAS: Jangan Nyinyir, Sudah Dibantu Badung

Singaraja, DenPost

Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana, dengan tegas mengatakan tidak ada istilah sulap menyulap dalam penyusunan APBD Buleleng. Semuanya berjalan sesuai dengan prosedur dan pembahasan yang panjang. "Kita sudah capek-capek mencari dana kesana-kemari untuk memajukan daerah, kok disebut main sulap. Di mananya itu ada sulap-sulapan," ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (8/4) kemarin.

Bahkan, Bupati dua periode ini mengatakan agar tidak nyinyir setelah menerima bantuan dari Kabupaten Badung selaku pemilik uang. "Jangan nyinyirlah, sudah dibantu kok nyinyir. Seharusnya bersyukur," sindirnya.

Ditanya terkait perubahan dari BKK menjadi ban-

sos, Bupati Agus Suradnyana mengatakan, regulasi keuangannya bisa dicek, dan semuanya itu sudah dalam pembahasan. "Pemasangan dana BKK itu ditentukan oleh yang punya uang. Nah Badung mintanya seperti itu (bedah rumah), ya kita selaku penerima ya bersyukur sudah dibantu. Itu pun harus tuntas satu kecamatan tidak boleh dipisah-pisah," bebernya.

Reaksi itu disampaikan Bupati PAS terkait dengan tuduhan anggota DPRD Buleleng, Putu Tirta Adnyana, terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2018 mulai dibahas DPRD Buleleng Senin (8/4) lalu. Dalam pembahasan di tingkat komisi terungkap, pos dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH) Ka-

bupaten Badung realisasinya nol persen. Padahal dalam APBD program itu dianggarkan dengan nilai total lebih dari Rp 22,5 miliar.

Selain itu, sejak ditetapkan anggaran itu merupakan BKK, namun dalam penjabaran APBD dana itu berubah menjadi bantuan sosial (bansos) berupa uang tunai. Di mana nilainya Rp 50 juta untuk setiap kepala keluarga (KK) penerima. Rinciannya, Kecamatan Seririt 60 unit, Kubutambahan 68, Gerokgak 65, Sukasada 41, Tejakula 48, Sawan 55, Banjar 52, dan Kecamatan Busungbiu 51 unit.

Anggota Komisi III yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Buleleng, Putu Tirta Adnyana, mengatakan, tidak teralisasinya BKK itu menunjukkan pemerintah daerah kurang cermat saat menyusun per-



DenPost/dok

Agus Suradnyana

encanaan anggaran. Bahkan dewan tidak mendapat penjelasan dengan terperinci mulai alokasi anggaran, siapa penerima manfaat dan pelaksanaannya. (118)

Nama Media : *DenPost*

Kategori : *Lomba Bidang Studi*

Gali Potensi Siswa Komite Sekolah Gelar Lomba Bidang Studi

Singaraja, DenPost

Komite SDN 1 Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, menggelar lomba bidang studi IPA, Matematika dan Bahasa Bali, Selasa (9/4) kemarin. Lomba diikuti 62 Sekolah Dasar (SD) se-

camatan Sukasada. Kegiatan ini bertujuan untuk mengapresiasi segala sumber daya yang dimiliki.

"Kegiatan ini untuk menciptakan semangat kebersamaan dan lingkungan yang kondusif, sehingga terwujud

budaya dan kinerja yang lebih baik. Dilandasi semangat kompetisi yang positif, sportif, dan inovatif," ucap Ketua Komite SDN 1 Pancasari, Gede Adi Mustika.

Selain itu, owner Wiwanda Agrowisata Pancasari ini, menyebut lomba ini untuk menggali potensi siswa, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kemajuan di berbagai bidang.

Sementara itu, Kepala SDN 1 Pancasari, Wayan Lemek mengatakan, lomba seperti ini rutin diselenggarakan setiap tahun di tingkat kecamatan dan kabupaten. Karena itu, pihaknya jauh sebelumnya sudah mempersiapkan siswa yang akan mewakili sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. "Maka pada acara peringatan HUT SDN 1 Pancasari kali ini, komite sekolah bekerjasama dengan pihak sekolah untuk mengisi salah satu kegiatan dengan lomba semacam ini," jelasnya.

Lomba Bidang Studi ini mengambil tema "Mengoptimalkan Peran Komite Sekolah guna mewujudkan Pendidikan yang berkarakter. Di mana, manfaat kegiatan ini akan dijadikan bahan evaluasi dan referensi untuk kegiatan selanjutnya," ungkapnya.

Hasilnya, Putu William Vanter dari SDN 1 Sambangan, sebagai juara 1. Juara 2 diraih, Kadek Dwi Antari, dari SDN 1 Gitgit, dan Juara 3, diraih, Gusti Ayu Kadek Sri Purnami, dari SDN 1 Padang Bulia. Juara Harapan 1,2, dan 3, masing-masing diraih, Putu Adellia Oktavia Fibrianti dari SD 2 Wanagiri, Luh Yulia Sukraeni dari SDN 5 Kayuputih Melaka, dan Kadek Taman, dari SD 5 Panji. Untuk Juara 1 memperoleh piala bergilir dari Ketua Komite SDN 1 Pancasari dan masing-masing juara mendapat Piala Tetap, sertifikat penghargaan dan uang pembinaan. (118)



DenPost/robin

HADIAH-Ketua Komite SDN 1 Pancasari, Gede Adi Mustika (pakaian adat), menyerahkan hadiah kepada para juara lomba bidang studi IPA, Matematika dan Bahasa Bali.